



## ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN)

*ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FINANCIAL PERFORMANCE AND CAPITAL  
EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH (STUDY ON MEDAN CITY GOVERNMENT)*

**Yusrida Ernawati**

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Email: yusridaernawati22@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui apakah terdapat suatu pengaruh antara kinerja keuangan yang diukur melalui kemandirian fiskal, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah yang terhadap suatu pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan juga berupaya dalam membuktikan apakah terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap suatu pertumbuhan ekonomi. Adapun yang terdapat pada suatu pertumbuhan ekonomi yang juga diukur dengan menggunakan sebuah rasio pertumbuhan PDRB. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dan kuantitatif dimana sebuah data yang telah digunakan adalah sebuah data sekunder yang diperoleh dari sebuah APBD Kota Medan selama 10 tahun terakhir yakni yang terdapat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memakai sebuah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menginformasikan bahwa di dalam 10 tahun terakhir (2014-2023) Kemandirian Fiskal dan sebuah Efektifitas Keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi dan sedangkan pada sebuah Efisiensi Keuangan yang telah berpengaruh secara signifikan terhadap suatu pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Selanjutnya, belanja modal juga berpengaruh kepada suatu Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan.

**Kata Kunci:** Kemandirian Fiskal, Efektifitas Keuangan, Efisiensi Keuangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

### ABSTRACT

*The aim of the research carried out is to find out whether there is an influence between financial performance as measured through fiscal independence, regional financial effectiveness and efficiency on economic growth. The research carried out also attempts to prove whether there is an influence of capital expenditure on economic growth. As for economic growth, it is also measured using a GDP growth ratio. This research is descriptive and quantitative research where the data that has been used is secondary data obtained from the Medan City APBD for the last 10 years, namely from 2014 to 2023. Analysis of the data used in this research uses an analysis of multiple linear regression. The research results inform that in the last 10 years (2014-2023) Fiscal Independence and Financial Effectiveness have had a significant influence on Economic Growth and Financial Efficiency has had a significant influence on economic growth in Medan City. Furthermore, capital expenditure also influences the economic growth of Medan City.*

**Keywords:** Fiscal Independence, Financial Effectiveness, Financial Efficiency, Capital Expenditures and Economic Growth.

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yaitu sebuah faktor yang begitu penting dalam suatu negara guna mendapatkan suatu kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan pernyataan (Permanda & Karimi, 2020; Utami, 2020) pertumbuhan ekonomi dapat

dinyatakan sebagai sejauh mana sebuah aktivitas suatu perekonomiannya yang telah mampu menghasilkan suatu tambahan pendapatan seorang masyarakat dalam suatu periode yang tertentu. Dapat juga dinyatakan bahwa terdapat sebuah perekonomian yang terus tumbuh maka terdapat kesempatan



kerja, pengurangan tingkat dalam kemiskinan, perbaikan gizi dan kesehatan, dan termasuk sebuah pendidikan yang akan menjadi baik (S. Astuti & Mispiyanti, 2019).

Negara yang telah mempunyai sebuah pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu merupakan seorang masyarakatnya yang telah berada di negara tersebut yang sudah dapat memenuhi suatu kebutuhan dasarnya dan bahkan juga mampu mendapatkan sebuah kesejahteraan (Siregar, 2016). Dan untuk sebaliknya, dalam pertumbuhan ekonomi ini yang menurun juga menunjukkan bahwa suatu kondisi dalam kesejahteraan masyarakat yang terdapat pada suatu negara tersebut yang juga menurun dan rendah.

Pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dapat juga disebabkan dengan berbagai macam faktor. Salah satu yang diantaranya adalah suatu pengelolaandalam sebuah keuangan yang ada pada suatu pemerintahan yang dapat berjalan dengan baik. Ada pun tata kelola yang baik (*good governance*) ini yang akan juga berpengaruh terhadap dalam suatu kemajuan suatu daerah. Yang Sejak berlakunya ada UU No 22 Tahun 1999 yang bertentang dengan suatu Pemerintah Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 yang bertentang suatu Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka dari itu daerah yang telah menjadi suatu pusat pengelolaan keuangan (Siregar, 2016). Daerah yang telah diharuskan untuk mengelola suatu keuangan yang dengan cara ekonomis, efisien dan efektif.

Pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan terhadap sejauh yang mana sebuah aktivitas perekonomian yang mampu menghasilkan sebuah tambahan dari sebuah pendapatan masyarakat dalam suatu periode yang tertentu (Permanda & Karimi, 2020; Utami, 2020). Tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

pemerataannya dalam suatu penghasilannya, yang berarti dengan cara langsung ataupun yang tidak langsung yang akan mengurangi sebuah jumlah dalam penganggurannya yang telah merupakan suatu keadaan yang dimana seorang telah tergolong angkatan kerja namun tetapi yang tidak memiliki suatu pekerjaan (Zakaria, 2020) serta telah menurunkan suatu tingkat kemiskinan, Dimana suatu kemiskinan ialah ketidak mampuan dalam memenuhi sebuah standar yang minimum kebutuhan dasar yang baik itu dengan suatu kebutuhan makan ataupun yang non makan (Kawulur et al., 2019).

Dalam sebuah anggaran yang harus memuat dengan suatu kinerja, yakni baik untuk dengan penilaian dengan cara yang internal ataupun yang keterkaitan dalam untuk mendorong suatu pertumbuhan ekonomi yang untuk selanjutnya mengurangi seorang pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinannya. Berdasarkan (Hadiati, 2013) pertumbuhan ekonomi ialah sebuah proses yang kenaikan terhadap output perkapita, pertumbuhan ekonomi yang telah ditujukan untuk suatu peningkatan terhadap sebuah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut (Afrizal, 2013; Zahari, 2017) PDRB adalah salah satu dalam sebuah indikator umum yang telah dapat menggambarkan sebuah kegiatan ekonomi suatu daerah yang terdapat dalam jarak waktu yang tertentu. Nilai dari PDRB yang tinggi akan dengan diikutinya suatu pertumbuhan ekonomi yang begitu meningkat dalam menunjukkan sebuah perekonomian daerah tersebut yang semakin menjadi membaik (Siregar, 2016).

Akan tetapi pada otonomi daerah yang sekarang ini yang sudah berjalan di sebuah Kota Medan yang tetap menimbulkan sebuah persoalan yang



baru, oleh karena dengan ternyata suatu potensi fiskal terhadap pemerintah daerah yang satu dengan daerah yang lainnya yang masih juga beragam. Hal ini yang telah disebabkan oleh suatu kesiapan fiskal dari setiap masing-masing suatu daerahnya yang telah berbedad dalam suatu pelaksanaan sebuah otonomi (Simanjuntak, 2017). Untuk hal ini telah disebabkan karena dengan adanya suatu peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka berdasarkan hal tersebut dapat diketahui dana yang akan dimiliki oleh suatu pemerintah daerah tersebut yang akan menjadi lebih tinggi, sehingga pemerintah daerah yang akan dapat berinisiatif untuk menggali sebuah potensi-potensi daerah dan pada akhirnya yang akan juga meningkatkan sebuah pertumbuhan ekonominya (Menajang, 2019; Siwu, 2019).

Pengelolaan dalam sebuah pemerintah daerah yang berkuwalitas, dan tidak bisa lepas dari sebuah anggaran pemerintah daerah. Setiap provinsi atau kabupaten di seluruh Indonesia yang telah mempunyai sebuah anggaran daerah yaitu sebuah rencana keuangan yang telah menjadi suatu dasar dalam suatu pelaksanaan pelayanan public (Arifin, 2018; Kuntadi et al., 2022). (Rofingatun & Kreuta, 2017; Tamboto et al., 2014) menyatakan suatu kemampuan suatu pemerintah daerah yang dalam mengelola suatu keuangan yang dituangkan dalam sebuah APBD yang gunanya menggambarkan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dalam pelaksanaan suatu tugas tugas pemerintah, sebuah pembangunan dan sebuah pelayanan sosial masyarakat. APBD

adalah sebuah instrumen kebijakan yang utama bagi suatu pemerintah daerah.

Telah tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi serta menurunnya seorang pengangguran dan kemiskinan yang juga tidak terlepas dari sebuah pengelolaan keuangan daerah yang begitu baik. Terdapat pada suatu kesesuaian dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diatur dalam Pemendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), dalam keuangan daerah yang harus dikelola dengan cara yang tertib, taat pada suatu peraturan sebuah perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab terhadap memperhatikan suatu azas keadilan, kepatuhan, serta yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Penilaian yang terhadap suatu pengelolaan keuangan daerah ini yang dapat dilihat dari sebuah hasil analisis tersebut terhadap APBD yang telah ditetapkan atau dilaksanakannya (Raharja, 2017; Suryanta, 2019).

Penyusunan dalam sebuah laporan keuangan dalam sebuah pemerintah daerah dalam sebuah pertanggungjawaban terdapat suatu pelaksanaan APBD, sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada suatu peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada suatu prinsip pengendalian yang intern dan standar akuntansi pemerintahan (Indonesia, 2003). Pengelolaan keuangan daerah yang baik yang akan berdampak pada suatu kemajuan di daerah itu. Kegagalan atau tidak maksimalnya pemerintahan daerah dalam menjalankan sebuah fungsi-fungsinya yang akan berbuah pada suatu kekecewaan masyarakat. Belum adanya perencanaan yang begitu terpadu dalam sebuah pengelolaan keuangan juga merupakan salah satu penyebab dalam



kelemahannya pada sebuah proses penyusunan anggaran (Suryanta, 2019).

Kelemahan utama dari sebuah sisi kelembagaannya yang telah terletak pada suatu desain organisasi yang tidak dirancang dengan khusus dalam sebuah rangka pemberian sebuah pelayanan kepada masyarakatnya, penuh dengan sebuah hirarki yang membuat pelayanan tersebut yang menjadi berbelit-belit (birokratis) dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakannya dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan yang masih sangat kental dilakukan oleh suatu pemerintah, yang juga menyebabkan suatu pelayanan public yang menjadi tidak efisien (Siti Maryam, 2017).

Terdapat pada studi terdahulu yang dilaksanakan untuk membuktikan bahwa suatu kemandirian daerah yang berpengaruh positif terhadap suatu pertumbuhan ekonominya (Siregar, 2016). Namun demikian, (G. Rondonuwu, 2016) telah membuktikan sebaliknya. Selain itu (W. Astuti, 2015) telah membuktikan bahwa sebuah rasio efektifitas yang berpengaruh positif terhadap sebuah pertumbuhan ekonomi, namun dengan sebuah rasio efisiensi yang tidak berdampak dengan signifikan yang terhadap dengan suatu pertumbuhan ekonomi.

Sementara dengan itu (Siregar, 2016) juga menyebutkan bahwa sebuah kinerja keuangan yang telah terdiri dari sebuah rasio kemandirian yang menunjukkan bahwa berpengaruh positif dengan cara yang signifikan terhadap suatu pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan yang pendapatan tidak berpengaruh dengan signifikan terhadap suatu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan (Suwandi & Tahar, 2015) kemandirian daerah ini yang

dicerminkan pada sebuah kemampuan daerah yang telah menghasilkan suatu penerimaan dalam pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari sebuah potensi-potensi ekonomi daerah dan yang bisa disebut juga suatu pendapatan asli daerah tersebut.

Pengukuran dalam sebuah kinerja dalam keuangan pemerintah daerah yang telah dapat memakai beberapa macam rasio, yaitu rasio kemandirian adalah sebuah kemampuan pemerintah daerah yang untuk mendanai suatu kegiatan pemerintah, pembangunan, serta suatu pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar sebuah pajak atau retribusi (Pramono, 2014; Saputra, 2014). (Siregar, 2016) membuktikannya bahwa sebuah rasio kemandirian yang berpengaruh positif signifikan pada suatu variabel pertumbuhan ekonomi, yang sehingga dapat diketahuinya bahwa sebuah kemandirian keuangan daerah dan kemandirian fiskal yang telah dapat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Dengan Hal ini juga yang didukung oleh seorang peneliti (Mawarni & Abdullah, 2013).

Rasio efektifitas yang merupakan suatu kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan suatu PAD yang telah direncanakan dan dibandingkan pada suatu target yang telah ditentukan berdasarkan sebuah potensi yang riil daerah (Pramono, 2014). Efektifitas keuangan daerah yang menunjukkan bahwa suatu Pemerintah Daerah yang selaku wakil masyarakat telah melaksanakan sebuah anggaran daerah yang telah mampu melaksanakannya dan merealisasikan sebuah anggarannya tersebut dengan cara yang optimal. Dengan suatu studi terdahulu yang dilakukan oleh (Siregar, 2016) yang telah membuktikan bahwa suatu kinerja keuangan pemerintah yang efektif telah berpengaruh positif yang terhadap suatu pertumbuhan ekonomi.



Efisiensi yang juga merupakan suatu perbandingan antara sebuah *output* dan *input* yang telah dikaitkan dengan suatu standar suatu kinerja atau sebuah target yang telah ditetapkannya (Erawan et al., 2018). Efisiensi yaitu suatu hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang telah dihasilkan terhadap sebuah kegiatan dan aktivitas dengan sebuah sumber daya (*input*) yang telah digunakan (Ardila & Putri, 2015). Dengan demikian sebuah efisiensi keuangan daerah yang telah merujuk pada suatu kondisi yang dimana besarnya *output* berupa realisasi Belanja Modal atau Belanja Pembangunan yang dibandingkan dengan suatu besarnya *input* yang telah berupa realisasi Pendapatan Daerah yang telah menunjukkan sebuah hasil yang begitu seimbang dan ideal (Siregar, 2016).

Selanjutnya Upaya fiskal (*fiscal effort*) merupakan suatu usaha yang telah dilaksanakan dengan dalam menggali sebuah potensi fiskal yang untuk meningkatkan sebuah pendapatan yang melalui berbagai macam suatu kebijakan fiskal (Pantas et al., 2019). Desentralisasi ini yang digunakan sebagai suatu sistem yang telah dipakai didalam suatu bidang pemerintahan yang merupakan suatu kebalikan dari sentralisasi. Dalam sebuah sistem desentralisasi ini, sebaigian kewenangan pemerintah yang telah dilimpahkan kepada suatu pihak yang lain untuk dilaksanakannya. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak yang lain ini untuk dilaksanakan yang disebut desentralisasi. Perbedaan dalam sebuah konsep desentralisasi ini telah ditentukan terutama yang berdasarkan suatu tingkat kewenangan untuk sebuah perencanaan, memutuskan dan untuk mengelola sebuah kewenangan yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi yang

telah diterima untuk melaksanakannya sebuah tanggungjawabnya (Suhartono, 2013).

Kemudian, dengan suatu kenyataan yang telah terjadi dalam suatu pemerintahan yang saat ini adalah Dimana dengan adanya suatu peningkatan suatu pertumbuhan ekonomi daerah yang ternyata tidak selalu untuk diikuti dengan suatu peningkatan dalam alokasi belanja modal yang telah dianggarkannya lebih kecil dari pada denganbelanja pegawai dari jumlah total sebuah anggaran belanja di setiap tahunnya (Arwati & Hadiati, 2013; Suwandi & Tahar, 2015). Padahal belanja modal yang merupakan suatu stimulus bagi suatu pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat pada konsekuensinya, suatu pemerintah yang perlu memberikan suatu alokasi belanja modal yang begitu lebih besar (Suwandi & Tahar, 2015).

Belanja modal yang merupakan belanja modal suatu pemerintah yang manfaatnya telah melebihi 1 tahun anggaran dan yang akan menambah suatu kekayaan atau sebuah aset daerah dan yang akan menambah belanja yang telah bersifat dengan rutin seperti biaya pemeliharaan pada suatu kelompok belanja administrasi umum (Andirfa et al., 2016; Darwanis & Saputra, 2014). Belanja modal yang juga dapat dipakai untuk mendapatkan suatu aset tetap dalam pemerintah daerah seperti sebuah peralatan, infrastruktur, dan sebuah harta tetap yang lainnya (Adyatma & Oktaviani, 2015). Sementara, dalam sebuah pengeluaran pembiayaannya antara lain yang dipakai untuk pembayaran kembali pokok dalam pinjaman, dan pemberian dalam sebuah pinjaman kepada entitas yang lain dan suatu penyertaan modal oleh suatu pemerintah daerah (Pratiwi & Pamungkas, 2014).

Terdapat dari ringkasan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka seorang



peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh kinerja keuangan dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang merupakan sebuah proses dalam perubahan suatu kondisi perekonomian suatu daerah yang telah menuju kepada suatu keadaan yang menjadi lebih baik dalam satu periode yang tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang menurut (Zahari, 2017) telah menunjukkan yang sejauh mana sebuah aktivitas dalam perekonomian yang akan menghasilkan sebuah tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Cara yang umum telah digunakan dalam mengukur sebuah pertumbuhan ekonomi nasional adalah melalui sebuah Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)*. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran yang menggambarkan suatu perkembangan ekonomi suatu daerah dalam satu tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang sangat penting untuk mengevaluasi perkembangan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga menandakan bahwa pembangunan telah dilakukan di wilayah tersebut dengan tujuan akhir yaitu kesejahteraan dan kesejahteraan Masyarakat (Siregar, 2016). Ukuran telah dipakai untuk melihat suatu pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu sebuah PDRB (Laily, 2016). Sebuah Indikator telah dipakai untuk mengukur sebuah pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah yaitu tingkat pertumbuhan PDRB yang reel.

PDRB yang merupakan sebuah nilai tambah bruto yang seluruh semua barang dan jasa yang telah tercipta atau yang dihasilkan di

wilayah domestik suatu negara yang telah timbul dengan akibat berbagai macam aktifitas ekonomi dalam suatu periode yang tertentu yang tanpa harus memperhatikan sesuatu apakah sebuah faktor produksi yang telah dimiliki residen ataupun non-residen (BPS: 2015). Pertumbuhan PDRB yang diukur dengan berdasarkan sebuah PDRB yang dengan Harga Konstan (Dama, 2016). Berikut adalah rumus formula pertumbuhan PDRB yang telah digunakan dalam suatu penelitian tersebut yaitu:

$$\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

### Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dalam suatu pemerintah daerah yang merupakan sebuah tingkat capaiannya dari suatu hasil kinerja yang di bidang keuangan daerah yang telah diukur dengan memakai sebuah indikator keuangan. Dan bentuk dari sebuah pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ini yang telah berupa sebuah pengukuran dalam suatu rasio keuangan yang untuk menilai apakah suatu pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan sebuah tugasnya dengan baik atau tidak. Menurut (Arianty, 2014), kinerja adalah suatu kuantitas dan kualitas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan individu, kelompok, ataupun organisasi.

Pada suatu sektor pemerintahan, kinerja yang telah dapat diartikan juga sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh seorang pegawai pemerintah atau sebuah instansi pemerintah yang dalam melaksanakan suatu pelayanan kepada masyarakatnya dalam suatu periode. Dan sedangkan menurut seorang (Melmambessy, 2022) kinerja keuangan pemerintah yaitu yang dapat diukur berdasarkan sebuah rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio efektifitas dalam sebuah keuangan daerah. Menurut (Maith, 2013;



Tanor et al., 2015) menyatakan kinerja keuangan yang merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat yang sejauh mana terhadap suatu perusahaan yang telah melaksanakan dengan memakai suatu aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang dengan cara yang baik dan benar.

Analisa keuangan merupakan suatu usaha yang mengidentifikasi suatu ciri-ciri keuangan yang berdasarkan sebuah laporan keuangan dan APBD. Rasio keuangan ini yang dapat dipakai untuk mengukur suatu akuntabilitas pemerintah daerah (Prarono, 2014) adalah sebuah rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektifitas, efisiensi, serta *debt service coverage ratio*. Menurut (Anwar et al., 2014) Kemandirian fiskal yang telah didefinisikan suatu kondisi kemandirian keuangan pada daerah yang telah diukur dengan sebuah rasio antara PAD dan TPD. Kemudian suatu rumus formula yang untuk menghitung suatu Kemandirian Fiskal yaitu:

$$\text{Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut (R. H. Rondonuwu et al., 2016), efektivitas dalam sebuah keuangan pemerintah yang menggambarkan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan sebuah PAD yang telah direncanakan dibandingkan pada sebuah target yang telah ditetapkan berdasarkan suatu kemampuan yang reel daerah. Berdasarkan pendapat (Sartika, 2019) yang untuk mengukur sebuah rasio efektifitas keuangan daerah yang juga dapat memakai sebuah rumus dengan yaitu:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerjemaan PAD}}{\text{Target Penerjemaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan pendapat (Susanto, 2019) rasio efisiensi merupakan sebuah rasio yang telah menggambarkan suatu perbandingan

antara suatu besarnya belanja yang telah dikeluarkannya oleh pemerintah daerah yang dibandingkan pada sebuah realisasi pendapatan atau penerimaan yang telah diterima. Kemudian, maka rumus yang telah dipakai untuk menghitung suatu besarnya sebuah rasio efisiensi keuangan daerah yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya begitu lebih dari 1 tahun anggaran dan yang akan menambah sebuah aset atau kekayaan daerah dan yang telah berakibat menambah suatu belanjaan yang bersifat rutin. Belanja modal juga diklasifikasikan dalam 2 kelompok, kelompok pertama yaitu belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dengan langsung yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk Kelompok kedua yaitu belanja aparatur yakni belanja yang terdapat dengan manfaatnya yang tidak bisa dinikmati dengan cara yang langsung oleh masyarakatnya akan tapi yang dapat dirasakannya dengan langsung pada aparaturnya (Anggraeny et al., 2016).

Belanja Modal yang juga merupakan belanja yang dilaksanakan dengan pemerintah yang mendapatkan sebuah aktiva tetap yang tertentu (Tumbuan et al., 2023). Belanja modal yang telah dimaksudkan yang untuk mendapatkan sebuah aset tetap pemerintah daerah, yakni sebuah peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan cara teoritis ada tiga cara yang untuk memperoleh sebuah aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan sebuah aset tetap yang lainnya, atau juga dengan membelinya.

(Eka & Nur, 2017) mengatakan bahwa belanja modal ialah suatu pengeluaran yang



telah dilaksanakan dalam sebuah rangka dan pembentukan suatu modal yang dengan sifatnya menambah sebuah aset tetap atau sebuah inventaris yang telah memberikan sebuah manfaat yang lebih dari 1 periode akuntansi, yang termasuk didalamnya yaitu pengeluaran yang untuk biaya pemeliharaan yang untuk sifatnya mempertahankan atau yang menambah masa manfaat, dan meningkatkan sebuah kapasitas dan kualitas sebuah aset (Eka & Nur, 2017).

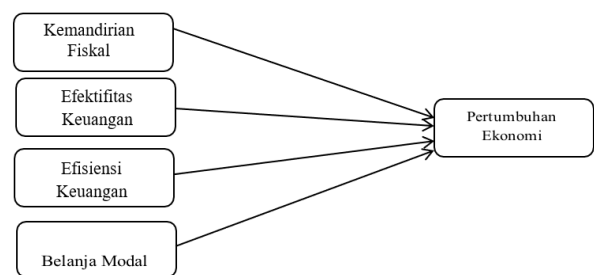
Belanja Modal juga bagian dari pengeluaran daerah yang ditujukan untuk pembangunan daerah. Dengan demikian, hampir 100% porsi belanja modal dibandingkan belanja daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengarahkan sumber daya yang diterima ke daerah untuk memaksimalkan pembangunan daerah. Menurut (Fathah, 2017) rasio Belanja Modal yang dapat dihitung dengan memakai sebuah rumus yaitu:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**METODE**

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data sekunder yang berupa data kuantitatif yang meliputi sebuah data keuangan APBD dan realisasinya, serta data PDRB Kota Medan periode 2014-2023. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebuah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji sebuah data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Kota Medan yang telah diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Dalam rangka meningkatkan PDRB maka pemerintah yang harus dapat melaksanakan kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan ini yang dapat diukur dengan menggunakan sebuah rasio-rasio seperti: kemandirian fiskal, efektifitas keuangan dan efisiensi keuangan. Dampak yang dapat membangun sebuah perekonomian suatu daerah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tentunya menuntut suatu adanya Belanja Modal. Berdasarkan penjelasan tersebut maka secara skematis kerangka pemikiran penelitian seperti dibawah ini.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Untuk menganalisisnya pengaruh Kinerja keuangan dan Belanja Modal terhadap suatu pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB digunakan dengan sebuah alat uji yang berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisiendeterminasi, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Deskriptif Statistik**

Untuk dapat melihat sebuah deskriptif statistik data penelitian dapat diketahui dari sebuah Tabel 1 yang sudah tertera dibawah:

**Tabel 1. Deskriptif Statistik Data Penelitian Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	10	27.43	52.31	39.87	3.326





Kemandirian Fiskal	10	28.32	53.65	40.01	3.545
Efektifitas Keuangan	10	103.21	140.73	121.46	4.765
Efisiensi Keuangan	10	86.33	124.74	107.57	4.876
Belanja Modal	10	12.45	46.87	29.97	2.952
Valid N (listwise)	10				

Sumber: Hasil Olahan Data (2024)

Tabel yang terdapat di atas telah menunjukkan bahwa terjadi sebuah penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan selama 10 tahun terakhir. Dimana sebuah penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut yang telah berada pada angka 27,43%, sedangkan untuk sebuah pertumbuhan ekonomi tertinggi yang telah berada pada persentase 52,31%.

Kemandirian Fiskal di Kota Medan yang terendah adalah 28,32%. Hal ini yang telah menunjukkan bahwa suatu kemampuan keuangan di Kota Medan pada angka tersebut sangat kecil dan sangat tergantung pada suatu bantuan dari luar. Sedangkan untuk kondisi Kemandirian Fiskal tertinggi telah berada di angka 53,65%, dimana hal ini yang telah menunjukkan bahwa pada angka yang demikian Pemerintah Kota Medan telah mampu meningkatkan suatu kemandirian dalam membiayai pembangunan di daerahnya dengan mengandalkan suatu keuangan dari daerahnya sendiri.

Efektifitas dalam sebuah keuangan Kota Medan selama 10 tahun terakhir dengan rata-rata pada angka 121,46%. Hal ini telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dimana sebuah Pemerintah Kota Medan telah mampu melaksanakan sebuah anggaran dengan baik dan efektif. Angka terendah dari efektifitas sebuah keuangan di Kota Medan adalah 103,21% dan yang tertinggi adalah 140,73%. Hal ini juga menunjukkan bahwa efektifitas dalam sebuah keuangan di Kota

Medan yang selalu berada di atas angka dengan nilai 100%.

Efisiensi dalam sebuah keuangan yang menunjukkan seberapa baik Pemerintah Kota Medan melakukan minimalisasi suatu biaya anggaran yang untuk memperoleh suatu pendapatan yang besar. Efisiensi keuangan Kota Medan yang terendah berada pada persentase dengan nilai 86,33%. Angka ini telah menunjukkan bahwa suatu kinerja keuangan yang telah dikelola oleh sebuah Pemerintah Kota Medan yang masih belum efisien. Dan Sedangkan untuk persentase yang tertinggi dari suatu efisiensi keuangan daerah adalah dengan jumlah 124,74%. Ini menunjukkan kinerja keuangan yang sangat efisien. Dalam sepuluh tahun terakhir dengan rata-rata kinerja keuangan Kota Medan adalah 107,57%, yang juga menunjukkan bahwa secara nilai rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan adalah efisien.

Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah yang telah menunjukkan dengan seberapa besar sebuah alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan dari semua total seluruh Belanja Daerah yang telah dianggarkan. Rasio Belanja Modal yang terendah adalah sebesar dengan nilai 12,45%, hal ini juga menunjukkan bahwa besarnya Belanja Modal dari semua total seluruh Belanja Daerah hanya sebesar angka tersebut, dimana angka dengan nilai 12,45% adalah sangat kecil. Sedangkan untuk rasio Belanja Modal tertinggi adalah dengan nilai 46,87%, dimana angka ini yang juga termasuk kecil



karena masih berada di bawah angka dengan nilai 50%. Kemudian nilai rata-rata Belanja Modal yang telah dialokasikan dari total Belanja Daerah dalam 10 tahun terakhir adalah dengan angka 29,97%, ini telah menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun, Pemerintah Kota Medan telah

melaksanakan pembangunan dengan menggunakan Belanja Modal sebesar 29,97% dari total seluruh Belanja Daerah.

**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Hasil dari uji regresi linear berganda yang dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	42.325	14.536		3.243	.000
Kemandirian Fiskal X <sub>1</sub>	.743	.154	.673	4.356	.000
Efektifitas X <sub>2</sub>	.724	.122	.547	3.425	.000
Efisiensi X <sub>3</sub>	-.065	.134	-.165	-.823	.098
Belanja Modal X <sub>4</sub>	.562	.167	.434	2.934	.002

a. Dependent Variable: Pertumbuhan\_Eko\_Y  
Sumber: Hasil Olahan Data (2024)

Berdasarkan dari sebuah nilai koefisien yang telah terdapat pada sebuah tabel di atas maka telah dapat dibuat rumus regresi dengan sebagai berikut:

$$Y = 42,325 + 0,743 X_1 + 0,724 X_2 - 0,065 X_3 + 0,562 X_4$$

Adapun terdapat sebuah penjelasan dari sebuah persamaan regresi tersebut yaitu:

- (1) Konstanta yang bernilai positif sebesar 42,325 yang artinya jika sebuah variabel Kemandirian Fiskal, Efektifitas Keuangan dan Efisiensi Keuangan Daerah adalah konstan, maka Pertumbuhan Ekonomi bernilai 42,325.
- (2) Koefisien regresi pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi adalah nilai positif yaitu yang diketahui sebesar 0,743. Artinya, apabila suatu Kemandirian Fiskal yang ditingkatkan dengan nilai 100% maka akan menyebabkan sebuah penurunan pada suatu Pertumbuhan Ekonomi yang sebesar 74,3%.
- (3) Koefisien regresi pengaruh Efektifitas

Keuangan Daerah yang terhadap suatu Pertumbuhan ekonomi adalah positif yang sebesar 0,724. Artinya, apabila suatu Efektifitas Keuangan Daerah yang ditingkatkan dengan nilai 100% maka akan meningkatkan suatu Pertumbuhan Ekonomi yang sebesar 72,4%.

(4) Koefisien regresi pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi adalah nilai negatif yang sebesar -0,065. Artinya, apabila suatu Efisiensi Keuangan Daerah yang ditingkatkan dengan nilai 100% maka akan menyebabkan suatu penurunan Pertumbuhan Ekonomi yang sebesar 6,5%.

(5) Koefisien regresi pengaruh Belanja Modal terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi adalah nilai positif yang sebesar 0,562. Artinya, apabila suatu Belanja Modal yang ditingkatkan dengan nilai 100% maka akan menyebabkan suatu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang sebesar 56,2%.

Dasar pengambilan keputusan untuk suatu uji t parsial dengan yang berdasarkan



pada suatu nilai signifikansi, dasar pengambilan keputusan adalah: (1) Jika nilai sig. < 0,05 maka sebuah variabel bebas berpengaruh dengan signifikan terhadap sebuah variabel yang terikat; dan (2) Jika nilai sig. > 0,05 maka sebuah variabel bebas tidak berpengaruh dengan signifikan terhadap sebuah variabel terikat.

Dengan melihat pada distribusi nilai  $t_{tabel}$ , maka telah diperoleh sebuah nilai  $t_{tabel}$  adalah dengan nilai 2,226. Kemudian nilai ini yang akan dibandingkan dengan sebuah nilai  $t_{hitung}$ . Hasil uji t pada suatu penelitian ini yang dapat dilihat pada sebuah Tabel3 yang di bawah ini:

**Tabel 3. Hasil Uji t**

Variabel	t tabel	t hitung	Sig.	Keputusan	Hasil
Kemandirian Fiskal ( $X_1$ )	2,226	4.356	.000	$H_0$ diterima	Berpengaruh signifikan
Efektifitas Keuangan ( $X_2$ )	2,226	3.425	.000	$H_1$ diterima	Berpengaruh signifikan
Efisiensi Keuangan ( $X_3$ )	2,226	-.823	.098	$H_0$ diterima	Tidak berpengaruh Signifikan
Belanja Modal ( $X_4$ )	2,226	2.934	.002	$H_0$ diterima	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Hasil Olahan Data (2024)

Berdasarkan pada tabel yang di atas telah diketahui bahwa suatu Kemandirian Fiskal berpengaruh terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi yang dengan cara signifikan. Hal ini yang bertentangan dengan penelitian (Siregar, 2016) yang membuktikan bahwa sebuah rasio kemandirian yang berpengaruh positif signifikan yang terhadap pada sebuah variabel pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini yang telah membuktikan bahwa sebuah Efektifitas Keuangan Daerah dapat mempengaruhi suatu Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan. Hal ini yang mendukung penelitian (Ani & Dwirandra, 2014) yang membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah yang efektif telah berpengaruh positif terhadap suatu pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa dalam rentang waktu yang 10 tahun terakhir Efisiensi Keuangan Daerah dengan pada kenyataannya yang tidak dapat

mempengaruhi sebuah Pertumbuhan Ekonomi yang dengan cara signifikan. Hal ini telah mendukung studi terdahulu yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa suatu efisiensi keuangan daerah dengan pada suatu kenyataannya yang tidak berpengaruh pada suatu pertumbuhan ekonomi (Siregar, 2016).

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa dalam rentang waktu yang 10 tahun terakhir belanja modal dengan pada kenyataannya yang dapat mempengaruhi sebuah Pertumbuhan Ekonomi yang dengan cara signifikan. Hal ini telah mendukung studi terdahulu yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa suatu efisiensi keuangan daerah dengan pada suatu kenyataannya yang berpengaruh pada suatu pertumbuhan ekonomi (Fathah, 2017).



## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir (2014-2023) Kemandirian Fiskal dan Efektifitas Keuangan berpengaruh signifikan terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi dan sedangkan dengan suatu Efisiensi Keuangan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan. Selain itu, sebuah Rasio Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi, karena sebuah rasio Belanja Modal ini yang juga dapat memperkuat sebuah hubungan antara Kemandirian Fiskal, Efektifitas dan Efisiensi Keuangan terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan.

### Saran

Berdasarkan dari sebuah hasil penelitian, Kemandirian Fiskal yang berpengaruh signifikan terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi dan sedangkan dengan suatu kondisi dimana suatu daerah yang telah mandiri dengan secara fiskal akan menunjukkan bahwa kondisi pembangunan yang baik sehingga berdampak pada suatu peningkatan ekonomi masyarakatnya. Demikian pula dengan suatu Efisiensi Keuangan yang tidak berpengaruh terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan.

Dengan demikian maka suatu implikasi dari sebuah kondisi ini adalah dimana suatu Pemerintah Kota Medan yang harus dapat mengalokasikan APBD untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung suatu meningkatnya sebuah investasi di daerah. Selain itu, terdapat pada pengalokasian Belanja Modal dalam struktur APBD yang harus lebih ditingkatkan lagi dalam sebuah

rangka meningkatkan sebuah pembangunan sarana dan prasarana di Kota Medan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(2).
- Afrizal, F. (2013). *Analisis pengaruh tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011*. Universitas Hasanuddin.
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(3).
- Anggraeny, S., Kudhori, A., & Lestariningsih, T. (2016). Analisis Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Madiun Tahun 2011-2015). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(1).
- Ani, N., & Dwirandra, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3), 481–497.
- Anwar, E., Kumenaung, A., & Kawung, G. (2014). Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012 Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(01).



- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan value for money pada pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1).
- Arianty, N. (2014). Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 14(2).
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, [Http://Jurnaltengkiang.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/JurnalTengkhian/Issue/View/1/Halaman](http://Jurnaltengkiang.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/JurnalTengkhian/Issue/View/1/Halaman), 20(20), 1–21.
- Arwati, D., & Hadiati, N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Semantik*, 3(1).
- Astuti, S., & Mispriyanti, M. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.
- Astuti, W. (2015). Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan (studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa periode 2007-2011). *EBBANK*, 6(1), 1–18.
- Dama, H. Y. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199.
- Eka, P. Y., & Nur, H. (2017). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).
- Erawan, P. A., SANTOSA, M. D. S. W. A. D. I., Budiarta, D. K. B., & WAHYUDI, P. T. A. (2018). Peranan Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3).
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Hadiati, N. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat*. Universitas Widyatama.
- Hariyanto, A. (2014). Penggunaan Basis Akrua Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Dharma Ekonomi*, 19(36).
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.



- Kawulur, S., Koleangan, R. A. M., & Wauran, P. C. (2019). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03).
- Khikmah, A. (2014). Pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten lamongan berdasarkan konsep value for money. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, 3(1).
- Kuntadi, C., Wahyuni, K. E., & Mansawan, C. M. (2022). Literature Review: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penganggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(6), 561–569.
- Laily, N. (2016). Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb). *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3).
- Maith, H. A. (2013). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi ISSN*, 2302(2013), 164.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10–15.
- Menajang, H. (2019). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 16(4).
- Nurmainah, S. (2013). Analisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 20(2).
- Pantas, O. O., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol*, 20(3).
- Permada, A. T., & Karimi, K. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 17(3).
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).
- Pratiwi, Y., & Pamungkas, B. (2014). Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2(1), 59–72.
- Raharja, A. K. Y. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus di



- Wilayah Soloraya Periode 2013–2015). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 13.
- Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2017). Analisis kemampuan keuangan daerah pemerintah kabupaten jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(3).
- Rondonuwu, G. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009-2014. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 4(2).
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Saputra, D. (2014). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147–153.
- Simanjuntak, B. A. (2017). *Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah: Membangun Indonesia Berkeadilan Sosial-Ekonomi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siregar, H. A. (2016). Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 1(1), 140–152.
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Siwu, H. F. D. (2019). Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(6).
- Suhartono, S. (2013). Desentralisasi pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18), 240019.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59.
- Suryanta, S. (2019). Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan di Kota Depok. *Cakrawala Management Business Journal*, 2(2), 372–389.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota DI Yogyakarta). *InFestasi*, 11(2), 118–136.
- Tamboto, L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2014). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam masa otonomi daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi*,



- Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).
- Tanor, M. O., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2015). Analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada pt. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3).
- Tumbuan, C. C. G., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 121–132.
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 101–113.
- Zahari, M. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 180–196.
- Zakaria, J. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kota makassar. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41–53.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 11–21.